



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Garuda Kasongan, Kabupaten Katingan – Provinsi Kalimantan Tengah
<https://www.bapenda.katingankab.go.id> email bapenda@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 900.1.13.1/ \12 /Bapenda-1/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah perlu adanya sistem yang jelas, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pengawasan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PAJAK DAERAH.**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana Diktum KESATU meliputi Penelitian, Peninjauan, dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dan/atau acuan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 20 Oktober 2025



Tembusan Yth. :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

email bapenda@katingankab.go.id website : www.bapenda.katingankab.go.id

Jln. Garuda Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

KASONGAN

Nomor SOP	:	113
Tanggal Pembuatan	:	20 Oktober 2025
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	 Kepala Badan Pendapatan Daerah EKA SURYADILAGA S.P.M.M Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19720529-199903 1 003
Nama SOP	:	Prosedur Pengawasan Pajak Daerah

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93).

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami prosedur PKB atau BBNKB
- Memahami Data Wajib Pajak
- Menguasai pengoperasian Komputer

Berkaitan

1. SOP Penetapan Pajak Daerah
2. SOP Penagihan Pajak Daerah

Peralatan / Perlengkapan

- Komputer / Printer / Alat Tulis Kantor

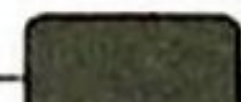
Peringatan

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan daerah

Pencatatan Pelaporan

- Data Pembayaran Wajib Pajak

SOP PENGAWASAN PAJAK DAERAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BUKU		
		PENGELOLA PENAGIHAN	KASUBID PENAGIHAN	KABID PENAGIHAN	KEPALA BAPPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
1	Menganalisa dan menyusun data objek pengawasan					Data Wajib Pajak	5 hari	Konsep data objek pengawasan pajak
2	Meneliti dan menyetujui data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan pajak	1 Hari	Konsep data objek pengawasan pajak
3	Meneliti, menyetujui dan menandatangani data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan pajak	30 menit	Konsep data objek pengawasan pajak
4	Menyusun dan mengajukan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan Pajak Daerah					Data objek pengawasan pajak	1 Jam	Konsep SPT
5	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	1 Jam	Konsep SPT
6	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	1 Jam	Konsep SPT
7	Menandatangani Surat Perintah Tugas Pengawasan Pajak Daerah					Konsep SPT	2 Jam	SPT Pengawasan Pajak Daerah
8	Menyiapkan kelengkapan dokumen pengawasan Pajak Daerah					Data dan Informasi Pajak	3 Jam	Data dan Informasi Pajak
9	Melaksanakan kunjungan/peninjauan lapangan untuk melaksanakan pengawasan Pajak Daerah					Data dan Informasi Pajak	7 hari	Informasi pajak

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BUKU		
		PENGELOLA PENAGIHAN	KASUBID PENAGIHAN	KABID PENAGIHAN	KEPALA BAPPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
10	Menyusun Kertas Kerja Pengawasan					Informasi pajak	1 hari	Kertas Kerja Pemeriksaan
11	Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Pengawasan Pajak					Konsep Laporan Pengawasan	1 hari	Konsep Laporan Pengawasan
12	Meneliti dan menyetujui konsep laporan pengawasan pajak					Konsep Laporan Pengawasan	1 Jam	Konsep Laporan Pengawasan
13	Menandatangani Laporan Pengawasan Pajak					Konsep Laporan Pengawasan	30 menit	Konsep Laporan Pengawasan
14	Mengarsipkan dokumen					Laporan Pengawasan	30 menit	Laporan Pengawasan